

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung**

##### **2.1.1. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung**

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan mempunyai visi :

**“ MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG“**

Pembangunan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan yaitu: perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut diselenggarakan untuk mencapai visi terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengandung makna bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mampu mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam upaya penanggulangan dari tindak kekerasan guna memperoleh kualitas sumberdaya manusia setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang pemberdayaan perempuan.

### 2.1.2. Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung disusun dengan menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi dan sasaran yang akan dicapai. Perumusan misi mengidentifikasi secara umum hal-hal yang ingin dicapai dan memungkinkan penerjemahan hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga operasionalisasi berbagai kegiatan dan hasilnya dapat diukur dan dikendalikan berdasarkan berbagai kriteria yang rasional dan objektif.

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

- Misi 1. : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya mendukung Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Misi 2. : Mendorong terwujudnya kebijakan yang responsive gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
- Misi 3 : Mengupayakan perlindungan, penghapusan kekerasan serta pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan.
- Misi 4 : Melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Misi 5 : Mendorong terwujudnya keluarga kecil yang sejahtera, sehat, maju dan mandiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterangan : Dasar Penyusunan Misi

Misi 1 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Misi ke-2) Gubernur dan Wakil Gubernur Priode 2012-2017

Misi 2 : Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Undang Undang KDRT), Peraturan Pemerintah R.I No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama masyarakat.

Misi 3 : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Misi 4 : Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000.

Misi 5 : BKKBN

## **2.2. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

### **2.2.1. Tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Mengoptimalkan kualitas manajemen yang akuntabel dan terintegrasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan
2. Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
3. Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
4. Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana

### 2.2.2. Sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Optimalnya kualitas manajemen yang akuntabel dan terintegrasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan
2. Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
3. Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan.
4. Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas.

### 2.2.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 telah menetapkan bahwa **pengarusutamaan gender** merupakan salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan.

Dalam rangka mencapai sasaran, strategi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak difokuskan pada:

1. Harmonisasi dan integrasi penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
2. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

3. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana.

Arah kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 :

1. Kebijakan peningkatan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.
2. Kebijakan peningkatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
4. Kebijakan peningkatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi pada tahun 2017 serta memperhatikan pencapaian prioritas nasional bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dalam periode 2012-2017 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas nasional bidang pemberdayaan perempuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan**  
**Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Harmonisasi dan Integrasi penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	1. Kebijakan peningkatan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.	MDG's
				2. Kebijakan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	
2.	Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kebijakan Peningkatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	SPM
3.	Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta posisi perempuan	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	MDG's dan IKK
4.	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	Kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	MDG's dan IKK

### 2.3. Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, selanjutnya untuk memperjelas capaian tujuan dan sasaran dimaksud maka disusun Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/05.a/BPPKBPA/2013 tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017.

Tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan**  
**Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	4,6% (2 dari 43 SKPD)	9,3% (4 dari 43 SKPD)	14% (6 dari 43 SKPD)	18,6% (8 dari 43 SKPD)	23,1% (10 dari 43 SKPD)
			Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	16,3% (7 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	18,6% (8 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	18,6% (8 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	21% (9 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	23,3% (10 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal
			Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	30	30	31	32	33
2	Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan serta posisi perempuan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	5,96%	5,99%	6,02%	6,06%	6,09%
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	6,13%	6,38%	6,46%	6,54%	6,62%
3	Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Optimalnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan
			Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	11	11	11	11	11
			Jumlah kab/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	0	1	1	2	3

4	Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	Optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan
			Tingkat prevalensi peserta KB aktif	78,72%	78,73%	78,74%	78,75%	78,76%
			Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	12,69%	12,19%	11,69%	11,19%	10,69%

## 2.4. Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mendukung implementasi RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan sebanyak 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis. Untuk mencapai target kinerja sasaran tahun 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Adapun target sasaran tahun 2015 telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015.

## 2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lalu Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

Tujuan Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata



komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsi. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2015.

**Tabel 2.3**  
**Penetapan Kinerja**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana**  
**dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan			<b>I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat</b>	<b>673.168.800</b>
	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	14% (6 dari 43 SKPD)	1. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	102.254.800
			2. Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)	251.987.200
			3. Advokasi dan Pelatihan PPRG provinsi kepulauan bangka belitung	85.566.400
	Persentase SKPD yang memiliki data terpilih	18,6% (7 dari 43 SKPD) 7 Instansi Vertikal	4. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	123.588.400
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang	30 Lembaga	5. Peningkatan Kapasitas Lembaga	66.321.200

	berperan dalam pemberdayaan perempuan		Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			6. Advokasi dan Fasilitas Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	43.450.800
Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan			<b>II. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>	<b>1.373.363.400</b>
	Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	1 Kebijakan	1. Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA	40.062.800
			2. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	315.657.800
			3. Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung	330.000.000
			4. Pelaksanaan Fasilitas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	58.100.400
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	6,02 %	5. Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	41.467.800
	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	6,46 %	6. Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan	147.408.800
			7. Pembinaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	217.528.800.

			8. Pembinaan dan Pengembangan Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	223.137.000.
Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak			<b>III. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>1.144.057.800</b>
	Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	4 Kebijakan	1. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	213.964.800
			2. Sosialisasi Pedoman Perlindungan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum	70.532.000
			3. Penyusunan Kajian Akademik terhadap Perlindungan Anak	148.255.600
	Jumlah Instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	11 Instansi	4. Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak	85.255.400
			5. Pembinaan Partisipasi Hak Anak	216.142.000
			6. Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam Rangka Perlindungan Anak	68.187.000
			7. Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak	269.167.800
	Jumlah Kabupaten Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)	1 Kab/Kota	8. Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak	72.553.200
Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas			<b>IV. Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga</b>	<b>759.945.000</b>
	Jumlah Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	1 Kebijakan	1. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga	331.115.000
	Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	78,74%	2. Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)	280.262.800

	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	11,69%	3. Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PK)	148.567.200
--	---	--------	---	-------------